ABSTRAK

HILMA MUKIMAH, NPM : 2022186, Judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan)", di bawah bimbingan Bapak **Drs. H. Arpandi, M.AP** sebagai Pembimbing I dan Bapak **Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing II.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dalam pelaksanaannya penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta koordinasi antar pihak yang belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang) serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 17 orang. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredebilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *member check.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah pada Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang belum optimal, dari indikator penyampaian informasi belum optimal karena sosialisasi belum dilaksanakan secara baik. Indikator kejelasan informasi, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dengan jelas. Konsistensi penyampaian informasi belum dilakukan secara konsisten, dari indikator staf kurang optimal jumlahnya masih terbatas. Indikator fasilitas belum optimal, karena banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat kegiatan operasional, indikator komitmen para pelaksana menunjukkan keseriusan menjalankan tugasnya. Indikator sikap/respon sudah optimal, pengelola memberikan sikap yang baik, indikator SOP kurang optimal, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator koordinasi belum optimal, perlunya penguatan agar pengelolaan bejalan lebih baik. Faktor yang mempengaruhi pertama faktor pendukung, adanya kesungguhan dan tanggung jawab, adanya pedoman dan dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan. Faktor penghambat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, Kultur budaya, kurangnya kerja sama yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan sampah, serta perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap berbagai kebutuhan yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Kepada pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat, serta perlu mempererat hubungan dengan pihak terkait. Kepada masyarakat diharapkan lebih dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

ABSTRACT

HILMA MUKIMAH, NPM: 2022186, Title "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY NUMBER 16 OF 2013 CONCERNING WASTE MANAGEMENT (Case Study of Tambalang Village, Sungai Pandan District and Banyu Hirang Village, Amuntai Selatan District)", under the guidance of **Mr. Drs. H. Arpandi, M.AP.** as Supervisor I and **Mr. Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP.** as Supervisor II.

Waste management is one of the important efforts in maintaining environmental cleanliness and improving the quality of life of the community. In its implementation, this research was motivated by several problems, including the lack of socialization, limited human resources, limited facilities, and coordination among related parties that has not been running optimally. This study aims to determine the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 16 of 2013 concerning Waste Management (Case Study in Tambalang Village and Banyu Hirang Village) and the factors that influence its implementation.

This research used a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, involving 17 informants. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility testing was carried out through extended observation, increased persistence, triangulation, peer discussions, and member checks.

The results indicate that the implementation of the Regional Regulation on Waste Management in Tambalang and Banyu Hirang Villages is suboptimal. This is due to inadequate information dissemination and inadequate information dissemination. The clarity of the information indicates that the community still lacks a clear understanding. Information dissemination has not been consistent, with staff indicators showing a limited number of staff. Facilities indicators are suboptimal, with many damaged, hampering operational activities. Commitment indicators demonstrate the seriousness of the implementers in carrying out their duties. Attitude/response indicators are optimal, with management demonstrating positive attitudes. Standard operating procedures (SOPs) are suboptimal, with implementation not yet fully complying with applicable regulations. Coordination indicators are suboptimal, with strengthening needed for better management. The first influencing factor is supporting factors: sincerity and responsibility, the existence of guidelines and a legal basis as a reference for implementation. Inhibiting factors include low public awareness and participation, budget constraints, cultural factors, and a lack of strong cooperation.

Based on the research findings, it is recommended that the Environmental Agency improve guidance and assistance for waste management and provide greater attention to various needs supporting the implementation of activities. The village government is expected to be more active in encouraging community participation and strengthening cooperation with related parties. The community is expected to increase awareness and concern for environmental cleanliness.